

BAB I

PENDAHULUAN

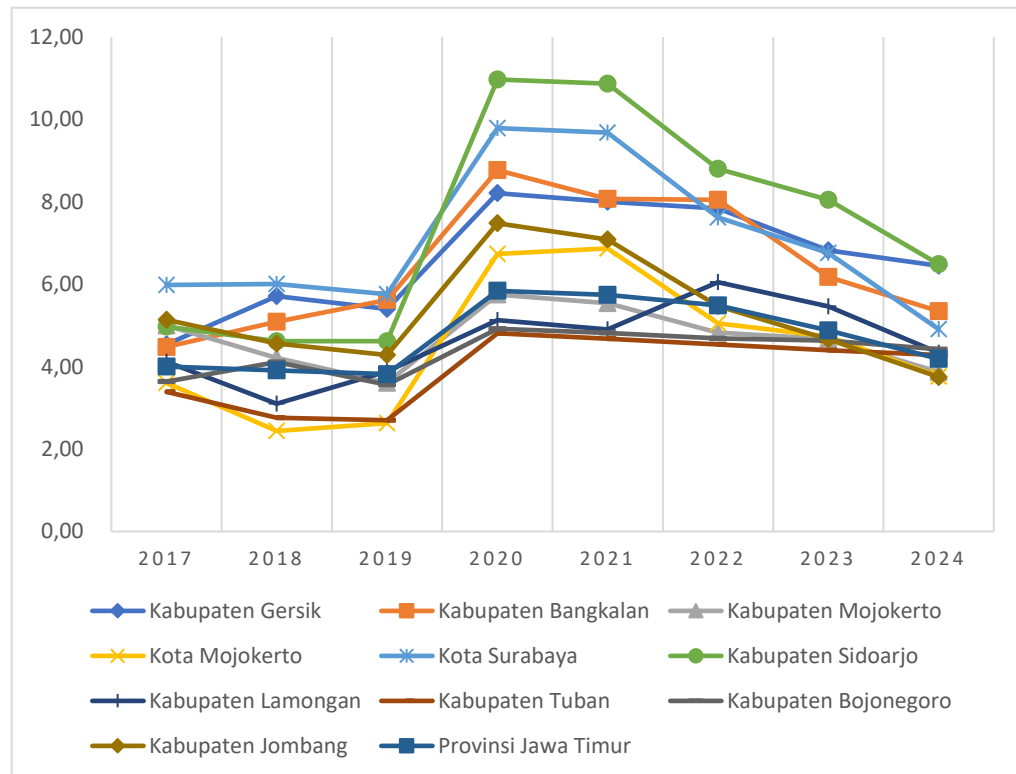
1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu persoalan utama dalam perekonomian yang hingga kini masih sulit untuk terpecahkan di setiap negara terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang (Priastiwi & Handayani, 2019). Hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang diharapkan, serta berpengaruh pada standar kehidupan dan perilaku masyarakat. Sukirno (2013) menyatakan bahwa individu yang dianggap sebagai pengangguran adalah seseorang yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan dengan batas upah tertentu dan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat merujuk pada seseorang yang sedang mencari pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sedang memulai usaha baru (Mankiw, 2006). Pengangguran terbuka mengacu pada individu yang tidak mendapatkan pekerjaan, secara aktif mencari pekerjaan kurang dari dua hari perminggu dalam bekerja atau belum berhasil mendapatkan suatu pekerjaan. Pengangguran ini dapat disebut sebagai pengangguran terbuka karna muncul sebagai akibat dari penurunan kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi atau kemunduran perkembangan suatu industri. Faktor utama penyebab pengangguran adalah jumlah ketersediaan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan jumlah ketersediaan pekerja yang dibutuhkan. Akibatnya jumlah pekerja yang menganggur semakin meningkat (Sukirno, 2013).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia dan termasuk salah satu Provinsi terpadat kedua di Indonesia. Kepadatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), pada tahun 2021 terdapat sekitar 40,16 juta jiwa yang tinggal di Jawa Timur. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran.

Provinsi Jawa Timur memiliki Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu Kawasan Gerbangkertosusila. Kawasan ini merupakan salah satu hasil dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila. Pada pasal 1 ayat (1) huruf (a) menyatakan “Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas kawasan Gersik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan dan wilayah sekitar meliputi Tuban, Bojonegoro dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkertosusila Plus”. Kawasan Gerbangkertosusila Plus menjadi pusat ekonomi dan industri di Provinsi Jawa Timur dengan berbagai sektor yang berkembang seperti manufaktur, perdagangan dan jasa. Selain itu manufaktur dan aksesibilitas yang baik menjadikan Kawasan Gerbangkertosusila Plus sebagai lokasi yang strategis dalam pengembangan berbagai bisnis dan

industri yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kawasan Gerbangkertosusila Plus berdasarkan Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur.

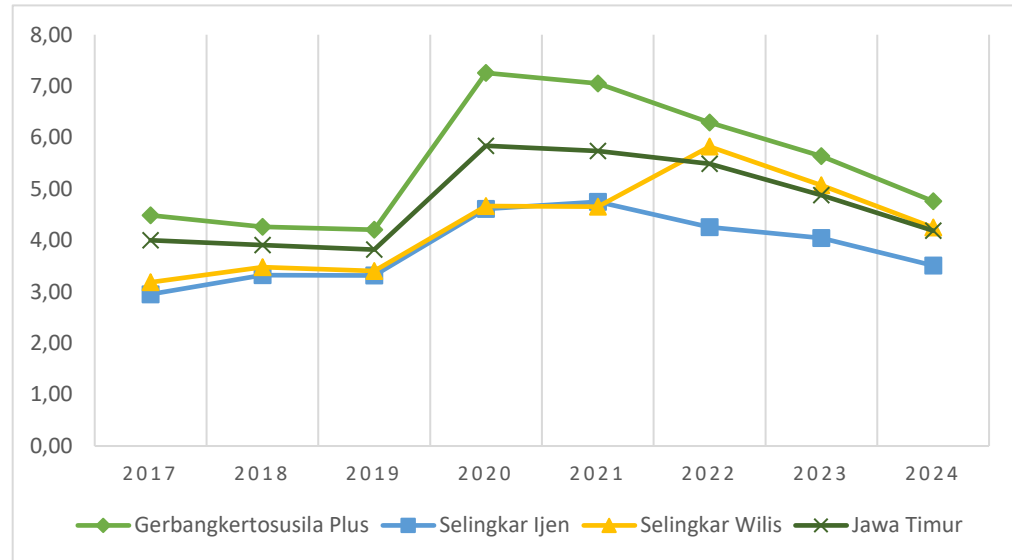


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

Gambar 1. 1 Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertosusila Plus dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus berdasarkan Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur mengalami naik turun. Tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus dan Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga banyak penduduk yang menjadi pengangguran. Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah

yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 10,97 persen pada tahun 2020 di bandingkan dengan wilayah lain yang ada di Kawasan Gerbangkertosusila Plus. Tidak hanya Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya juga menunjukkan angka tingkat pengangguran terbuka yang tinggi sebesar 9,79. Sedangkan Kabupaten Tuban memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain terutama sebelum tahun 2020. Kabupaten Lamongan juga memiliki angka tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah, meskipun ada kenaikan pada tahun tertentu. Setelah pandemi tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di beberapa wilayah yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya masih memiliki angka tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada masalah ketenagakerjaan yang perlu ditangani. Berikut data rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kabupaten/Kota.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2026 (diolah)

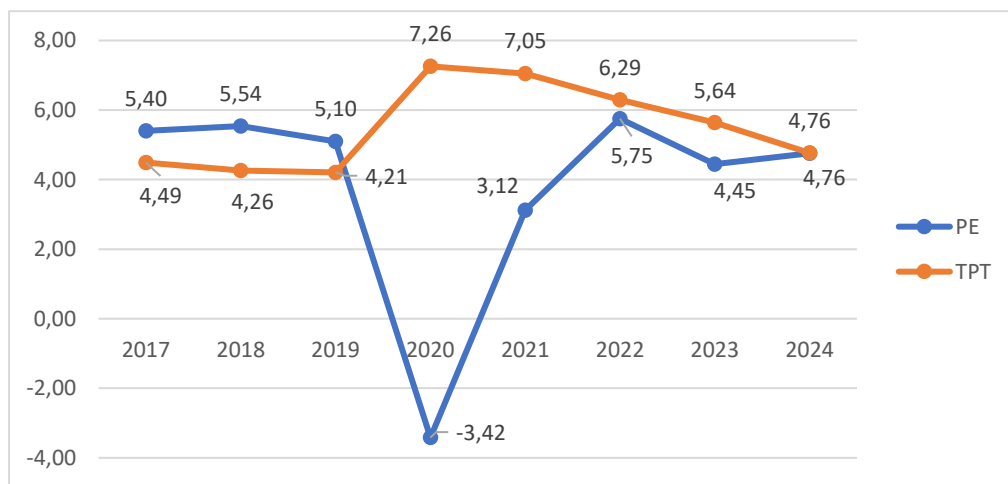
Gambar 1. 2 Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2024 (Persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Provinsi Jawa Timur mengalami naik turun dengan pola naik pada 2020 dan tren penurunan setelahnya. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Provinsi Jawa Timur, rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus lebih tinggi. Penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi antara tahun 2017 dan 2024, menunjukkan situasi ekonomi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup tajam di seluruh kawasan akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, pada periode 2021 hingga 2024, tingkat pengangguran mulai menurun kembali seiring dengan proses pemulihan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Perbedaan tingkat

pengangguran antar kawasan ini menunjukkan adanya variasi karakteristik ekonomi, di mana kawasan perkotaan seperti Surabaya yang termasuk dalam Gerbangkertosusila Plus lebih banyak ditopang sektor industri dan jasa sehingga lebih mudah terdampak perubahan ekonomi, sedangkan Selingkar Ijen dan Selingkar Wilis yang lebih banyak bergantung pada sektor pertanian cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dengan pola yang relatif lebih stabil.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi atau nilai tambah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah dalam periode tertentu (Romhadhoni et al., 2019). Perubahan tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tanpa pengaruh inflasi (Todaro, 2008). Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa pada tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut semakin baik. Terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Hukum Okun menyatakan hubungan negatif antara pengangguran dan *Gross Domestic Product*. Penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam *Gross Domestic Product* yang mendekati 2 persen (Mankiw, 2006). Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, tingkat

pengangguran terbuka akan mengalami peningkatan. Sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran terbuka menurun. Namun, pada kenyataannya tidak semua pertumbuhan ekonomi yang meningkat mampu menciptakan lapangan kerja secara merata, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat padat modal dari pada tenaga kerja manusia dalam melakukan proses produksi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

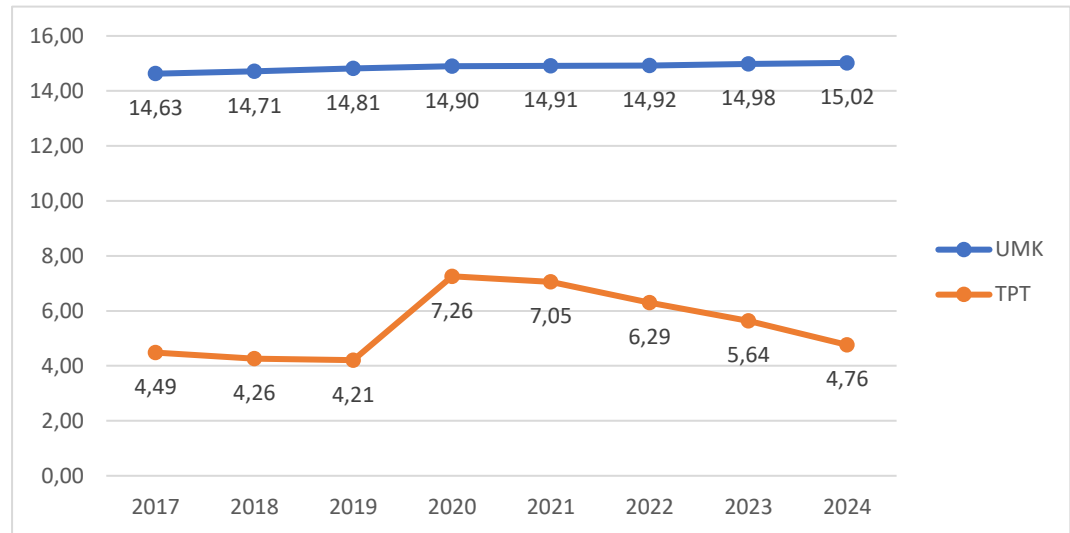
Gambar 1. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pola yang tidak konsisten. Pada beberapa periode peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penurunan pengangguran, sesuai dengan Hukum Okun. Namun, pada periode lain hubungan tersebut melemah yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya. Hal ini menunjukkan bahwa

Hukum Okun berlaku secara parsial dalam konteks wilayah dan periode penelitian.

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga sering dihubungkan dengan tingkat pengangguran (Syahputra et al., 2019). Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur di suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra et al. (2019) menyatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja yang menjelaskan bahwa biaya yang lebih tinggi akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran karena perusahaan tidak dapat meminta lebih banyak tenaga kerja pada tingkat upah yang lebih tinggi. Pada tingkat upah yang tinggi, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja agar tidak terbebani oleh biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Bagi pengusaha upah merupakan hal penting karena menyangkut keputusan pengusaha untuk menambah, mengurangi dan mempertahankan karyawannya. Peningkatan upah membuat perusahaan menghadapi 2 pilihan yaitu menggunakan tenaga kerja atau menggunakan teknologi mesin. Apabila biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk menambah jumlah produksi dengan menggunakan mesin relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya tambahan untuk menggunakan tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat karena perusahaan mengurangi jumlah pekerja (Yacoub & Firdayanti, 2019). Besar kecilnya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan

tergantung pada volume permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

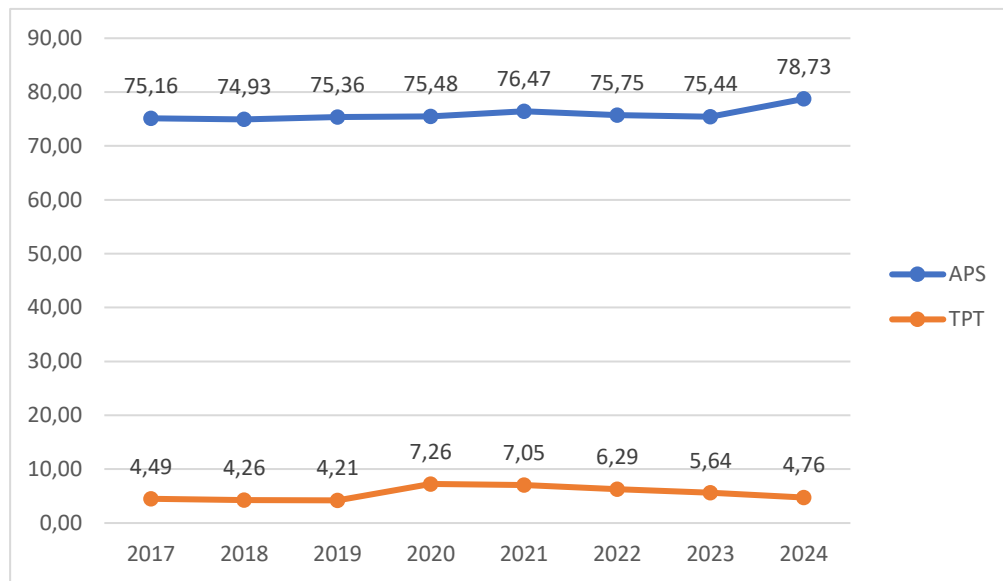
Gambar 1. 4 Rata-Rata Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4 hubungan antara upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya konsisten sepanjang periode penelitian. Pada beberapa tahun peningkatan UMK tidak diikuti oleh kenaikan TPT, bahkan disertai dengan penurunan pengangguran yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum tidak secara langsung menekan permintaan tenaga kerja. Namun, pada periode lain hubungan tersebut tampak melemah, ketika perubahan TPT lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dibandingkan oleh penyesuaian UMK. Hal ini menunjukkan bahwa teori permintaan tenaga kerja yang menyatakan kenaikan upah akan menurunkan penyerapan tenaga kerja berlaku secara parsial, karena dampak UMK terhadap pengangguran sangat bergantung pada

dinamika ekonomi, struktur pasar kerja dan kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja di wilayah penelitian.

Selain pertumbuhan ekonomi dan upah minimum, pendidikan juga mempunyai hubungan terhadap tingkat pengangguran (Filiyasi & Setiawan, 2021). Pendidikan merupakan suatu investasi pada bidang sumber daya manusia yang akan dirasakan pada masa mendatang (Filiyasi & Setiawan, 2021). Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan sistematis guna menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dengan aktif, baik dari segi jasmani (fisik) maupun rohani yang dibutuhkan oleh diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan upah minimum sebagai kompensasi atas pengorbanan biaya, tenaga dan waktu untuk pendidikan yang telah dijalani. Hal ini sejalan dengan teori Human Capital, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan penghasilan seseorang karena setiap penambahan satu tahun pendidikan, maka akan semakin baik kualitas dan kemampuan yang dimiliki seseorang dan seharusnya tidak menganggur (Sumarsono, 2003). Tingkat pendidikan dapat menjadi tolak ukur kualitas tenaga kerja yang baik, karena tingkat pendidikan adalah proses menambah ilmu atau kemampuan seseorang. Namun, peningkatan pendidikan tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran. Jika peningkatan pendidikan tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, maka para pencari kerja akan kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga akan meningkatkan pengangguran. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh kondisi demografis, khususnya ketika jumlah penduduk usia produktif terus meningkat.



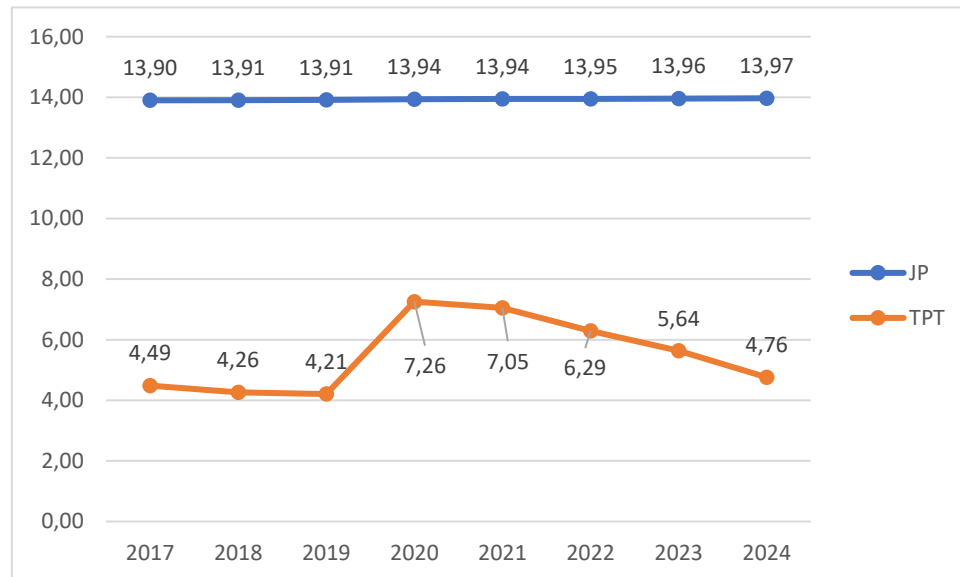
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

Gambar 1. 5 Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.5 hubungan antara angka partisipasi sekolah (APS) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan pola yang tidak selalu konsisten sepanjang periode penelitian. Pada beberapa tahun, peningkatan APS diikuti oleh penurunan TPT, sehingga hubungan tersebut sesuai dengan teori Human Capital yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan meningkatkan kualitas dan kemampuan individu serta menurunkan risiko pengangguran. Namun, pada periode lain hubungan tersebut tidak sejalan dengan teori, karena perubahan TPT lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan

keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori Human Capital dalam konteks wilayah dan periode penelitian bersifat parsial.

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang mempunyai tempat tinggal tetap, sumber penghasilan, dan terdaftar secara sah menurut peraturan perundang undangan setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni (2020) menyatakan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif terhadap jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk dapat berdampak pada berapa banyak orang yang akan memasuki angkatan kerja. Teori kependudukan melihat jumlah penduduk sebagai faktor yang dapat memperbesar jumlah pencari kerja, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja (Malthus, 1798). Jumlah penduduk yang bertambah, terutama dari kalangan usia kerja (15–64 tahun) dapat menjadi potensi bonus demografi. Bertambahnya penduduk disebabkan oleh banyaknya bayi yang lahir dan berkurangnya penduduk disebabkan oleh kematian seseorang diberbagai usia. Jika penduduk pada suatu daerah bertambah, maka jumlah angkatan kerja akan bertambah, apabila tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dapat menimbulkan pengangguran (Farza, 2020). Jumlah penduduk yang bertambah, akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja yang dapat meningkatkan pengangguran (Bidarti, 2020).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 (diolah)

Gambar 1. 6 Rata-Rata Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.6 jumlah penduduk menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan jumlah pencari kerja dan menambah tekanan pasar kerja, sebagaimana dijelaskan dalam teori demografi. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap pengangguran tidak selalu searah pada seluruh periode, sehingga teori kependudukan dalam penelitian ini juga berlaku secara parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2022), Syahputra et al. (2019) dan Runturambi et al. (2024) menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pernyataan diatas tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2022), Afifah (2023) dan Pandiangan et al. (2021) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan

dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pada penelitian sebelumnya mencerminkan adanya kesenjangan hasil terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Provinsi Jawa Timur. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang masih ada melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kawasan Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017-2024”**. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus, serta dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus?

3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila Plus.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan serta perkembangan ilmu ekonomi terkait pengaruh pertumbuhan

ekonomi, upah minimum, pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.
- b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun dan merencanakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur khususnya pada Kawasan Gerbangkertosusila Plus.